

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

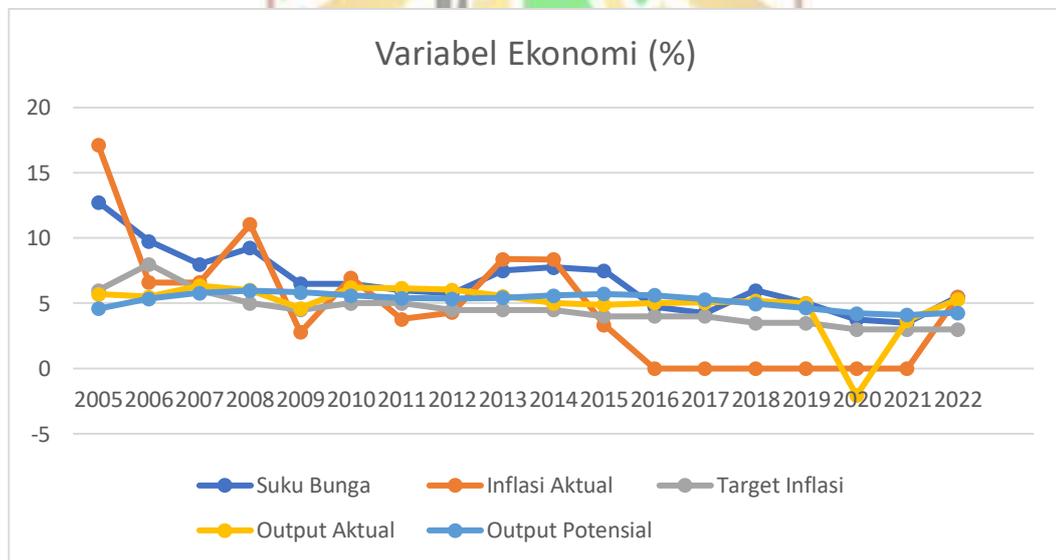
Kebijakan moneter berperan penting dalam suatu negara melalui instrumen moneter, yaitu transmisi suku bunga. Mayoritas negara menggunakan suku bunga sebagai acuan utama instrumen kebijakan moneter (Goncalves, 2015). Suku bunga mengendalikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan suku bunga nominal (Maher, Zhao, & Tang, 2022). Suku bunga nominal dipengaruhi oleh besaran inflasi dan output (Baroroh, 2012). Suku bunga ini digunakan oleh bank sentral untuk meredam laju inflasi yang berdampak pada stabilitas output (Duke, et al., 2024). Tingkat bunga nominal mengontrol laju inflasi sesuai dengan target yang ingin dicapai, sehingga mampu mengendalikan output sesuai dengan tingkat potensialnya (Arisandy, 2016).

Suku bunga berpengaruh terhadap permintaan konsumsi dan tabungan. Kenaikan laju inflasi direspon oleh peningkatan suku bunga yang mendorong konsumen untuk menabung, sehingga konsumen mengurangi konsumsi. Konsumen melakukan pinjaman ketika terjadi penurunan suku bunga, sehingga mengalami peningkatan konsumsi (Rasyidin, Saleh, & Rizkina, 2023). Transmisi suku bunga mempengaruhi evolusi parameter makro ekonomi untuk mencapai tujuan. Suku bunga acuan ditetapkan dengan tepat menjadi persyaratan efektif kebijakan moneter (Duke, et al., 2024).

Independensi bank sentral menjadi syarat utama untuk mencapai tujuan inflasi yang rendah dan stabil (Gonzalez & Martinez, 2004). Tahun 1998 Bank Indonesia menetapkan sebagai bank sentral yang independen. Independensi bank sentral diartikan tidak adanya intervensi atau ikut campur pemerintah dalam kebijakan yang diterapkan *policymaker*. Disisi lain, pemerintah berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Napitupulu, 2016). Pemerintah berperan dalam meningkatkan pajak, menerbitkan surat utang ataupun meminjam kepada bank konvensional (Andriani & Gai, 2013). Bank sentral berfokus pada tujuan tunggal (*single objective*) yang ditulis dalam Undang-Undang No.23 tahun

1999 tentang memelihara kestabilan nilai rupiah (Ismail, 2006). Hal ini mengidentifikasi bahwa bank sentral menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan output, karena harga yang tidak stabil berpengaruh terhadap ketidakstabilan ekonomi (Andriani & Gai, 2013).

Policymaker menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan moneter. Menurut penelitian Salim & Fadilla (2021) ditemukan adanya *trade off* antara peningkatan laju inflasi disertai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Besaran suku bunga dirancang untuk mencapai target inflasi sekaligus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. *Trade off* diproyeksikan dapat mencapai keseimbangan yang optimal serta merumuskan kebijakan yang efektif dan solutif dalam independensi bank sentral. Bank sentral yang independen idealnya menggunakan *rules policy* dalam menjalankan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga (Warjiyo & Solikin, 2016). Kebijakan *rules* memberikan inflasi yang rendah ketimbang menerapkan kebijakan diskresi (Taylor, 1993). Kebijakan *pure rule* dapat mencapai stabilitas inflasi, sehingga membentuk kebijakan yang lebih kredibel dan konstan (Maichal, 2012).



Sumber: Bank Indonesia, 2024

Gambar 1.1 Perkembangan Variabel Ekonomi

Data di atas menggambarkan kondisi Indonesia setiap tahunnya mengalami fluktuasi inflasi dan volatilitas output yang menimbulkan ketidakpastian makroekonomi (Wongsoatmojo & Rizkianto, 2014). Ketika Indonesia mengalami

peningkatan inflasi namun bank sentral melakukan kebijakan penurunan suku bunga. Kondisi ini dibuktikan dengan penelitian Setiawan (2012) yang menemukan kebijakan moneter di Indonesia tidak bersifat *strict rule*. Kebijakan moneter mempertimbangkan variabel selain inflasi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Kasus ini dibuktikan pada tahun 2008 di Indonesia mengalami krisis ekonomi global. Kondisi ini menggambarkan peningkatan inflasi yang cukup signifikan, namun bank sentral menerapkan kebijakan penurunan suku bunga. Hal ini bertujuan untuk mendorong stimulus pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan gairah sektor usaha di tengah lesunya perekonomian global. Kasus ini memperlihatkan bank sentral Indonesia mengarah pada kebijakan diskresi. Hal ini mengacu pada penelitian dari Rahutami (1994), Indonesia menggunakan kebijakan moneter bersifat *discretion*. *Discretion policy* digunakan akibat keterbatasan pengetahuan para ekonom tentang makroekonomi, sehingga memutuskan kebijakan yang terbaik pada saat itu tanpa mengarah pada panduan kebijakan.

Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan perekonomian dan inflasi yang belum stabil dan terkendali. Kondisi ini diperparah dengan laju inflasi yang masih sulit menuju target yang ditetapkan otoritas moneter Indonesia (Rahmahdian & Warjiyo, 2013). Selain itu, Indonesia mengalami perekonomian yang tidak sejalan dengan kapasitas optimal. Bank sentral mengalami kesulitan dalam mencapai target akhir. Salah satu penyebabnya, ketidaktepatan dalam mengimplementasikan kebijakan moneter yang diikuti oleh otoritas moneter (Goncalves, 2015).

Dewasa ini, Indonesia belum mengimplementasikan secara jelas dalam menerapkan kebijakan moneter *rules* atau *discretion*. Oleh sebab itu, bank sentral yang independen merumuskan *design rule* sesuai dengan kebutuhannya. Rancangan aturan membutuhkan pendekatan yang terstruktur dalam mengimplementasikan kebijakan moneter. Menurut Warjiyo & Solikin (2016) menyarankan untuk mengimplementasikan model Taylor *rule* (Warjiyo & Solikin, 2016). Taylor *rule* menjadi kerangka moneter yang memberikan panduan suku bunga yang terstruktur. Taylor *rule* menggambarkan kebijakan moneter dalam menjalankan strategi stabilitas harga dengan tetap berfokus pada tujuan jangka panjang. Taylor *rule* memiliki instrumen suku bunga dengan indikator besarnya

yaitu, inflasi dan output (Warjiyo & Solikin, 2016). Model ini diharapkan mampu mencapai target inflasi dan memperbaiki bias inflasi.

Penelitian Nainggolan (2004) menganalisis Taylor *rule* layak diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan model Taylor *rule* berfokus pada besaran suku bunga yang sesuai dengan instrumen moneter utama Indonesia (Erawati, 2012). Selain itu, dalam Taylor *rule* terdapat *Inflation Targeting Framework* (ITF). ITF terbukti dapat mengendalikan volatilitas inflasi dan output di negara EMEs (Cecchetti & Ehrmann, 1999). Model Taylor *rule* memiliki kerangka moneter yang bersifat *forward-looking*, di mana bank sentral dapat memprediksi perkembangan inflasi sesuai dengan target ditetapkan.

Taylor *rule* berperan sebagai model evaluasi kebijakan moneter dalam perekonomian dengan membandingkan inflasi yang terjadi ke depan sesuai dengan sasaran inflasi yang direncanakan (Arisandy, 2016). Bank sentral mengumumkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar mengetahui fenomena yang terjadi serta menggambarkan arah kebijakan yang diterapkan bank sentral. Dengan demikian, model Taylor *rule* bersifat transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter yang diimplementasikan.

Kebijakan Taylor *rule* diprediksi dapat mencapai tujuan akhir sebuah negara, yaitu *social welfare*. Indikator dalam *social welfare* adalah kestabilan harga dan stabilitas ekonomi yang sesuai dengan variabel Taylor *rule* dengan instrumen untuk mencapai *social welfare* adalah suku bunga. Oleh karena itu, Taylor *rule* diprediksi layak diterapkan di Indonesia untuk mencapai sasaran akhir dari kebijakan moneter.

Namun studi empiris Bueno (2005) memiliki pandangan kontra terkait Taylor *rule*. Hasil penelitiannya menyatakan model Taylor *rule* tidak layak diterapkan di negara berkembang. Hal ini dikarenakan negara tersebut sebagai negara pembangunan yang berfokus pada stimulus peningkatan laju konsumsi. Ketika inflasi meningkat, maka pembuat kebijakan menurunkan suku bunga dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini, berdampak pada stabilitas output dan memperkuat stabilitas perekonomian (Taylor, 2017).

Oleh karena itu, setiap penelitian memiliki perbedaan pandangan dalam asumsi pengimplementasian sesuai atau tidaknya model Taylor *rule* diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kebijakan moneter di negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam melakukan pengujian prinsip Taylor *rule*. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat sebuah judul, **“Pengujian Kebijakan Moneter di Indonesia menggunakan model Taylor *rule*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis melakukan pengujian kebijakan moneter di Indonesia dengan menetapkan rumusan masalah yaitu, apakah Indonesia saat ini sudah mengimplementasikan prinsip model Taylor *rule* dalam merumuskan kebijakan moneter?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji kesesuaian kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia yang saat ini dalam mengikuti prinsip Taylor *rule*. Hal ini menganalisis kelayakan dan relevansi Taylor *rule* di Indonesia dalam stabilitas inflasi dan ekonomi. Penelitian ini membandingkan Taylor *rule standard* dan *augmented forward-looking*. *Augmented Taylor rule* menambahkan variabel *money supply* dan *exchange rate*. Perbandingan ini penting untuk melihat dinamika ekonomi yang lebih kompleks dan membuat kebijakan yang lebih akurat.

